Covid 19 dan Arah Ekonomi Indonesia

Oleh :

Sutrisno

Dosen Program pascasarjana Fakultas Ekonomi Universitas Borobudur Jakarta

Email :

Covid 19 yang telah menyebar keseluruh dunia, termasuk Indonesia terdampak Covid 19 sampai dengan 24 April 2020 sesuai informasi Data Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19, telah mencapai jumlah kasus pandemic sebanyak 8.211 kasus positive Covid 19, dari jumlah itu 1.002 pasien sembuh, dan meninggal dunia sebanyak 689 orang. Terkait dengan pandemic Covid 19, pemerintah telah melakukan langkah-langkah penanganan dampak pandemi Covid 19 menyangkut bidang ekonomi, sosial dan kesehatan. Langkah-langkah tersebut antara lain dengan mengeluarkan paket untuk menghadapi dampak Covid 19 dengan mengeluarkan anggaran terdampak berupa stimulus sebesar Rp.405,1 triliun yang terdiri untuk: program pemulihan ekonomi nasional sebesar Rp.150 triliun, perlindungan sosial sebesar Rp.110. triliun, bidang Kesehatan sebesar Rp.75.triliun, insentif perpanjangan dan stimulus Kredit Usaha Rakyat Rp.70,1 triliun. Covid 19 telah menimbulkan dampak social, ekonomi yang cukup berat di berbagai sector ekonomi antara lain, di bidang pariwisata, hotel hotel dengan tingkat hunian/Load Factor yang sangat rendah, restoran-restoran, industri/toko souvenir, jasa transportasi mengalami kelesuan. Pabrik – pabrik/ industri mengalami kelesuan usaha, akibatnya banyak perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja karyawan, sehingga pengangguran dan kemiskinan

bertambah. Angka kemiskinan pada tahun 2020 diperkirakan oleh SMERU Research Institute sebanyak 33,24 juta orang (scenario berat), melonjak dari jumlah orang miskin pada tahun 2019 sebanyak 24,79 juta orang. Terkait dengan program stimulus terdampak Covid 19 sebesar Rp.405,1 triliun, untuk mengcover pengeluaran dana tersebut, yang mengakibatkan defisit APBN 2020 diprediksi akan membengkak dari proyeksi defisit sebesar Rp.307,2triliun atau sekitar 1,76% dari Produk Domestik Bruto, diperkirakan akan mengalami defisit APBN 2020 sebesar Rp.852,9 triliun atau 5,07% dari Produk Domestik Bruto. Sesuai ketentuan batas maksimal defisit anggaran adalah 3% dari PDB, sehingga pelampauan defisit APBN tersebut pemerintah (Presiden) menerbitkan Perppu untuk menjadi payung hukum pelampauan defisit tersebut dengan Perppu Nomor 1 Tahun 2020.

Proyeksi Pendapatan APBN 2020 yang tadinya diperkirakan Rp.2.233,2 triliun, akan mengalami penurunan menjadi Rp.1.760. triliun, karena pendapatan pajak diperkirakan tidak akan tercapai/ mengalami softfall. Sumber dana untuk mengatasi dampak Covid 19 tersebut berasal dari penerbitan utang jangka panjang pemerintah, baik dalam rupiah maupun mata uang US\$. yang dijual di pasar uang luar negeri dan dalam negeri, untuk dalam negeri Surat Utang Jangka Panjang tersebut dijual kepada Bank Indonesia. Dengan pembelian surat utang negara oleh Bank Indonesia

berarti Bank Indonesia seperti menambah likuiditas di perekonomian yang akibatnya menaikkan angka inflasi. Persoalan ekonomi dengan kenaikan harga kebutuhan pokok/pangan, obat-obatan, bahan baku obat, bahan baku barang-barang produksi yang karena kebutuhan berbagai komoditas pangan jumlah produksi/barang-jenis bahan makanan yang tidak tercover dari produksi dalam negeri, telah menimbulkan beban bagi rakyat, produsen/industri karena untuk memenuhi kebutuhan pangan, bahan baku dengan mengimpor. Di lain pihak karena kondisi fundamental ekonomi Indonesia mengalami tekanan/pelemahan, yang mengakibatkan terjadi *capital flight* sebesar Rp.169 Triliun posisi Akhir Maret 2020 di pasar uang/modal, sehingga IHSG mengalami penurunan drastis dari semula dalam level 6.500 an dalam bulan Januari 2020, pertengahan Maret 2020 terkoreksi menjadi dibawah 4.000. Nilai tukar rupiah juga mengalami pelemahan, pernah mencapai diatas Rp.17.000.- terhadap US\$.1. Dengan membengkaknya pengeluaran negara untuk mengatasi dampak Covid 19 tersebut hampir seluruh negara di dunia mengeluarkan anggaran stimulus ekonomi, atau pengucuran likuiditas oleh Bank Sentral dengan membeli surat berharga/ utang yang diterbitkan oleh perusahaan swasta atau negara. Misalnya Amerika Serikat, pemerintah AS mengeluarkan stimulus sebesar US\$.2,2 triliun, dan The Fed/ Bank Sentral AS menyediakan dana untuk membeli surat berharga atau stimulus tersebut disebut Quantitative Easing sebesar US\$.820 milyar, Jepang US\$.528.milyar, India US\$.22,6 milyar , Korea Selatan US\$.7,44 milyar. Dampak ekonomi akibat Covid 19, rantai pasokan barang/jasa terganggu baik untuk barang hasil produksi

dalam negeri atau impor, kebutuhan bahan baku, pangan, obat-obatan, peralatan medis, alat pelindung diri bagi tim medis mengalami kelangkaan, sehingga harga mengalami kenaikan, termasuk untuk barang impor harga nya mengalami kenaikan karena melemahnya nilai tukar rupiah terhadap US\$. Akibat pandemic Covid 19, Indonesia pada tahun 2020 membutuhkan dana untuk pembiayaan defisit APBN sebesar Rp.1.439,8 triliun , yang terdiri untuk pembiayaan defisit APBN sebesar Rp.852,9 triliun, pembiayaan investasi untuk pemulihan ekonomi sebesar Rp.153,5 triliun, pembayaran hutang jatuh tempo Rp.433,4 triliun. (sumber Kementerian Keuangan RI).

Dalam memenuhi kebutuhan pangan dengan jumlah penduduk yang terus meningkat sekitar 1,2% per tahun, maka apabila hanya bertumpu dari produksi dalam negeri, baik untuk kebutuhan pangan/bahan pangan, produksi/hasil panen dalam negeri tidak mencukupi kebutuhan/konsumsi, maka dipenuhi dengan impor, misalnya beras, daging, bawang merah, bawang putih, cabe, berbagai jenis buah-buahan/hortikultura , bahkan bawang bombay sebagian besar diimpor. Untuk obat-obatan Sebagian besar di impor, atau kalau obat-obatan tersebut diproduksi di dalam negeri, bahan baku obat hampir 90% juga diimpor, belum peralatan medis (farmasi & kedokteran) juga diimpor. Impor barang-barang elektronik seperti: Kulkas, AC, rice cooker, dispenser, almari kulkas dan lain-lain kalau barang-barang tersebut diproduksi di dalam negeri, peralatan/mesin-mesin, bahan bakunya juga diimpor, sehingga memerlukan devisa khususnya dalam US\$, cukup besar dan ini dampaknya akan menekan/membani perekonomian Indonesia karena ketergantungan oleh barang-barang impor yang menguras cadangan devisa.

Dengan adanya pandemik Covid 19, masalah kebutuhan pangan sedikit mengalami gangguan karena impor mengalami gangguan transportasi/*supply chain*, produksi negara eksportir juga mengalami penurunan karena adanya *lock down* di negara-negara eksportir. Berdasarkan permasalahan yang diuraikan di muka, maka **saatnya/momentum** dilakukan

evaluasi/transformasi/reorientasi arah/kebijakan pembangunan ekonomi Indonesia dimasa depan, dalam pengertian bagaimana struktur ekonomi Indonesia agar **lebih didominasi oleh pemenuhan dari kebutuhan akan barang/jasa yang dihasilkan/diproduksi didalam negeri**, dan bahan baku untuk barang-barang tersebut juga dipenuhi dari dalam negeri, **arahnya adalah menuju swasembada/kemandirian pangan dan non pangan, dan jangka panjang menuju/mampu melakukan ekspor, minimal menghasilkan barang substitusi impor**. Secara garis besar arah kebijakan ekonomi bertumpu/memprioritaskan pada hal-hal sebagai berikut:

Pertama, pertanian/tanaman pangan seperti, beras, kedelai, gula pasir, daging sapi/kerbau, bawang merah, bawang putih, bawang bombai, berbagai jenis buah-buahan/hortikultura seperti jeruk, apel, anggur, dan lain-lain, bagaimana strategi untuk dapat dipenuhi dari dalam negeri, kalau karena gagal panen yang disebabkan oleh hama tanaman, kemarau panjang atau banjir, baru impor untuk memenuhi kekurangan stok kebutuhan pangan. Hal ini menyangkut manajemen pra atau pasca panen, system breeding/pembibitan, juga penelitian pengembangan pembibitan/benih, penyimpanan digudang/cold storage dan lain-lain. Pemenuhan kebutuhan pangan atas

dasar swasembada/kemandirian pangan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani/peternak sekaligus menjamin pasokan kebutuhan pangan, yang dalam jangka panjang dengan jumlah penduduk yang terus meningkat, penduduk pada akhir tahun 2019 diperkirakan sebesar 267 juta orang, dengan asumsi naik 1,2% pertahun, jelas kebutuhan pangan akan terus meningkat, maka pengamanan pasokan kebutuhan pangan jelas perlu diprioritaskan, karena merupakan kebutuhan dasar yang cukup penting, dimana kebutuhan dasar tersebut meliputi: pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan. Tujuan lain adanya prioritas menuju swasembada/kemandirian pangan juga untuk mengurangi kenaikan harga karena melemahnya nilai tukar rupiah terhadap US\$, yang dampaknya menguras devisa dan membebani rakyat karena kenaikan harga pangan impor tersebut.

Kedua, BBM dan energi, dalam jangka panjang ladang-ladang minyak makin tidak tergantikan/*un renewable*, kecuali mengeksplorasi/mengeksploitasi sumber/ladang minyak baru, namun Indonesia sudah menjadi negara pengimpor minyak/ *net importing oil countries*, sejak tahun 2004, sehingga faktor impor minyak menjadi faktor paling dominan dari timbulnya defisit neraca perdagangan dan defisit transaksi berjalan (*current account deficit*). Maka alternatif penggunaan minyak perlu dilakukan misalnya penggunaan biodiesel, geothermal, biofuel, fosil, batubara, gas dan lain-lain, mengingat kebutuhan akan energi akan semakin besar baik untuk industri maupun kebutuhan/konsumsi rumah tangga. Dalam kisaran Untuk kebutuhan/konsumsi minyak di Indonesia per hari dalam kisaran 1,6 juta barrel/per hari, sedangkan lifting/produksi minyak sebesar 800.ribu barrel/ per hari,

sehingga impor minyak per hari dalam kisaran 800.ribu barrel/ per hari. Dengan pertumbuhan penduduk untuk memenuhi segala kebutuhan, termasuk energi rumah tangga, untuk industri, jasa transportasi, dll jelas akan meningkat tiap tahunnya, maka kebutuhan energi/ minyak harus diperhitungkan dan disediakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Ketiga , Masalah infrastruktur, untuk memenuhi kebutuhan distribusi, transportasi barang/orang antar daerah/pulau/kota/desa yang meliputi jalan toll/non toll, transportasi darat/laut/udara, sungai, maka pembangunan pelabuhan/bandara, jaringan irigasi pertanian, pembangkit tenaga listrik/air dan lain yang selama sudah dilaksanakan harus lebih ditingkatkan, khususnya transportasi darat/sungai/laut antar daerah daerah terpencil/tertinggal. Misal pembangunan jalan toll, Kereta Api, Pelabuhan/bandara perintis di luar Pulau Jawa. Hal yang penting diperhatikan adalah bagaimana mengembangkan system konektivitas/transportasi terpadu dan terintegrasi antar moda yang efisien, aman, lancar, nyaman baik untuk distribusi logistic barang dan manusia.

Keempat, Pembangunan/pengembangan industri harus didorong dengan regulasi, insentif kemudahan perijinan, penyediaan infrastruktur penunjang, tax allowance atau tax holiday. Industri substitusi impor tersebut misalnya; industri farmasi/obat-obatan, alat-alat kesehatan, produk-produk kosmetik, industri elektronik, dan barang-barang impor lainnya. Pembangunan industri substusi impor untuk memenuhi kebutuhan barang impor, menghemat devisa, menyerap tenaga kerja, termasuk insentif penggunaan bahan baku dalam negeri. Untuk industri farmasi/obat-obatan yang

berbasis bahan baku/bahan mentah local, misal industri biopharmacy (berbasis bahan baku dari tumbuh-tumbuhan dalam negeri yang cukup beragam), dengan tujuan menghemat devisa. Terkait dengan dampak pandemi Covid 19, pemerintah Jepang mengeluarkan kebijakan berencana akan merelokasi/memindahkan perusahaan /pabrik pabrik dari Jepang untuk keluar dari negeri tirai bambu China, ke negara. Dengan alasan Jepang tidak ingin terlalu tergantung pada satu negara yakni China untuk suplai produk manufaktur, untuk merealisasikan rencana relokasi pabrik-pabrik milik perusahaan asal Jepang tersebut, pemerintah Jepang menyediakan anggaran sebesar US\$.2,2 milyar. Salah satu negara tujuan hengkangnya perusahaan Jepang dari China tersebut adalah negara-negara anggota ASEAN, begitu juga Amerika Serikat terkait dengan Covid 19 dan perang dagang dengan China, juga slogan yang dicanangkan Donald Trump dengan “The First America”, juga merupakan peluang salah satu nya bagi Indonesia. Namun dengan berdasarkan pengalaman keluarnya 33 perusahaan asal China, yang keluar dari China untuk menghindari kenaikan pajak/bea masuk yang dikenakan kepada barang impor dari China oleh Amerika Serikat, yang tidak satu pun masuk ke Indonesia, dimana 23 perusahaan asal China pindah ke Vietnam, dan 10 perusahaan pindah ke Thailand, Malaysia dan Filiphina. Maka perlu Indonesia berbenah diri dalam hal kemudahan bisnis dan daya saing global, karena peringkat Indonesia kemudahan dalam berbisnis pada tahun 2019, di ranking 73 dunia, dan Daya Saing Global pada ranking 50 dunia.

Kelima, pengelolaan moneter lebih prudent sesuai dengan fungsi Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas moneter dalam

hal pengendalian harga/inflasi (*inflation targeting framework*), kebijakan makro prudensial dan mendukung system stabilitas keuangan, melalui terjaganya stabilitas nilai tukar rupiah terhadap US\$, aliran modal asing baik yang investasikan dalam proyek-proyek/pabrik (*foreing direct investment*) maupun dalam pasar uang/modal (*portfolio investment*). Juga dalam menjaga stabilitas system keuangan dengan instrument, suku bunga acuan (*BI 7-Day Reverse Repo Rate*), sebagai *Lender Of the Last Resort* untuk mendukung fungsi intermediasi bank operasional dalam hal kesulitan likuiditas. Dalam system nilai tukar yang mengambang murni (*floating exchange rate system*), intervensi/sterilisasi pasar valuta asing dengan menjual atau membeli US\$ untuk menjaga nilai tukar rupiah dalam batas yang efektif, tidak *under* atau *over value* (*real effective exchange rate*). Secara umum fungsi Bank Indonesia yang bertanggung jawab dalam pengelolaan moneter dan mendukung stabilitas system keuangan yang mendukung/mendorong pertumbuhan ekonomi sudah dilaksanakan secara prudent/*prudential policy* terus dipertahankan/ditingkatkan.

Keenam, Investasi Langsung dari PMA/PMDN lebih diarahkan pada menghasilkan produk/barang yang berorientasi ekspor, minimal untuk produk substitusi impor sehingga dapat meningkatkan/ mengurangi pengeluaran valuta asing yang dapat mempengaruhi cadangan devisa. Untuk menarik minat investor mau berbisnis/menempatkan dananya untuk mendirikan usaha/ pendirian pabrik dan lain lain bidang usaha di Indonesia. Antara lain, mempercepat/kemudahan proses perijinan dalam satu pintu/kantor (*single submission one stop gate*), masalah pengadaan lahan

untuk kegiatan usaha, penyediaan infrastruktur pendukung seperti energi listrik, air, jalan raya dll.

Ketujuh, Peningkatan kemampuan kewirausahaan/ UMKM, dengan akses permodalan, penciptaan/dukungan akses pasar/konsumen, pelatihan manajemen/keahlian/ketrampilan, juga perlunya pembentukan pengusaha pemula/ start up. Pemberian bansos berupa Bantuan Langsung Tunai, Beras kepada kelompok rakyat miskin/ rentan miskin tetap diteruskan, namun untuk memotong mata rantai kemiskinan, perlu diciptakan wirausaha pemula/ start up khusus kelompok usia kerja produktif yang tidak/belum mempunyai pekerjaan tetap baik disektor formal maupun informal. Pola pembinaan/pembentukan pengusaha pemula/strat up harus diciptakan oleh kementerian/dinas teknis terkait misalnya: Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, Kementerian Pengentasan Kemiskinan/ Daerah Tertinggal, para calon wirausahawan pemula ini diberikan pelatihan dan pemberian modal stimulan, dibentuk kelompok binaan yang ditangani oleh tim yang terpadu dari antar dinas teknis terkait. Untuk calon wirausahaan pemula/ start up dapat direkrut dari para lulusan Perguruan Tinggi (berijasah D3/D4/S1) terutama yang berdomisili/bertempat tinggal didaerah binaan calon pengusaha pemula tersebut, semacam TKS/BUTSI pada decade 1980 an yang lalu. Dengan dibentuk nya pengusaha pemula akan mengurangi jumlah pengangguran tenaga terdidik sekaligus apabila usahanya sudah berkembang diharapkan dapat menciptakan peluang kerja, sehingga ada efek multiplier dari pembentukan wirausahawan pemula/pioneer tersebut.

Dengan demikian pembangunan ekonomi Indonesia dapat menciptakan wirausaha-wirausaha baru dan tangguh, mengurangi kemiskinan, pengangguran, mengurangi ketidakadilan dalam pemilikan aset nasional, mengurangi ketergantungan akan produk/barang/bahan pokok/pangan dari impor. Dengan dominannya penggunaan produk/barang hasil produksi dalam negeri sehingga hasil kebijakan industri/produk pertanian substitusi impor atau berorientasi ekspor, maka diharapkan akan meningkatkan surplus neraca perdagangan dan transaksi berjalan yang berkesinambungan, menghindari ekonomi Indonesia dari gejolak ekonomi

global, juga kerentanan ekonomi domestik terhadap merosotnya nilai tukar rupiah.

Kesimpulan dari tulisan ini adalah dengan adanya pandemi Covid 19, merupakan momentum melakukan transformasi/restrukturisasi/reorientasi/perubahan arah strategi dan kebijakan pembangunan ekonomi Indonesia yang lebih mengutamakan produksi dalam negeri dalam memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa, juga mendorong produksi untuk ekspor, minimal substitusi impor.

Jakarta, 02 Mei 2020

Dr. Sutrisno, SE. MM